



Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



**'Macan' SRG
Indramayu Bangkit**

**Timah, Gambir, Teh dan Kopra
Jadi Subjek Komoditi SRG**

**2018 OJK Targetkan
Sekuritisasi SRG**

4-7	Berita Utama	14-15 Agenda Foto
	- 2018 OJK Targetkan Sekuritisasi SRG	16-17 Aktualita
	- Dumoly F. Pardede : SRG, KUR dan LKM Untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia	- Timah, Gambir, Teh dan Kopra Jadi Subjek Komoditi SRG
8-9	Resi Gudang	- Polda Kalbar Bentuk Satgas Waspada Investasi
	'Macan' SRG Indramayu Bangkit	- KKP Gandeng Bappebti Wujudkan 9 Gudang SRG Garam
10-11	Berjangka	- Revitalisasi Satgas Waspada Investasi
	- Indonesia Bakal Gandeng Vietnam Kendalikan Harga Kopi Dunia	18 Analisa
	- PBK Harus Bebas <i>Money Laundering</i>	19 Breaking News
12-13	Pasar Lelang	20 Info
	Pasar Lelang Cabai Siborong-borong Mencuat Tanpa Disokong	21 Info SRG

22-24 KomiKita
SRG dan Pasar Lelang Komoditi



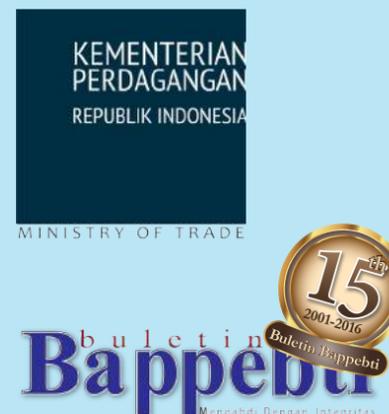
24-25 Kolom
Perbandingan KBE vs Produk Lainnya



26-27 Kiprah
SRG Pemasang
Siap Melenggang

Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Didi Sumedi

Penyunting/ Editor
Taufik KS
Annisa F Wulandari
Aryo Guritno

Fotografer
Apriliyanto
Poppy Juliyanti
Gita Regina

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
humas.bappebti@kemendag.go.id



Foto : Kabag Kerjasama dan Informasi Publik Bappebti, Taufik KS, menyambangi Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pematang, Hepi Priyanto.

Indonesia sebagai salah satu produsen sekaligus eksportir kopi terbesar di dunia, hingga saat ini justru dikendalikan oleh negara-negara yang bukan penghasil kopi. Harga kopi Indonesia diperdagangkan di pasar internasional mengacu pada harga yang terjadi di bursa berjangka di London, Inggris, dan bursa New York di Amerika Serikat. Agar Indonesia bisa ikut mengendalikan harga kopi di pasar internasional, tercetus wacana mewajibkan penjualan kopi di dalam negeri melalui bursa berjangka komoditi. Wacana itu pun mengadopsi perdagangan komoditi timah yang tata niaganya ditentukan pemerintah melalui bursa berjangka komoditi.

"Kalau itu bisa dilakukan, kita akan menjadi produsen dan sekaligus eksportir kopi yang menentukan harga jual di pasar internasional," tegas Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, pada diskusi perkopian nasional yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan dengan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia- AEKI dan Jakarta Futures Exchange- JFX di Jakarta 3 Juni 2016, lalu.

"Tujuan dilakukannya pengendalian harga kopi melalui bursa berjangka komoditi, itu, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menciptakan pasar yang transparan di dalam negeri," ucap Karyanto Suprih.

Terkait dengan meningkatkan kesejahteraan petani, Otoritas Jasa Keuangan- OJK juga berambisi untuk menyandingkan sistem resi gudang- SRG dengan Kredit Usaha Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro. Hal itu pun dilontarkan Deputi Komisioner Industri Keuangan Non-Bank OJK, Dumoly F. Pardede,

pada sosialisasi SRG, KUR dan LKM yang diselenggarakan Perum Jamkrindo di Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

"Lebih lanjut dikatakan kami akan menyelenggarakan focus group discussion-FGD terkait SRG ini. Selain OJK, pihak yang akan diundang adalah Bappebti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia." Tujuan diselenggarakannya FGD itu agar fokus, siapa melakukan apa dan hasilnya seperti apa, ucap Dumoly F. Pardede.

Hal lain yang menarik dan menjadi topik pilihan Redaksi pada penerbitan Buletin Bappebti yang kita cintai ini adalah, rencana OJK untuk melakukan sekuritisasi SRG di pasar modal pada tahun 2018 mendatang. Wacana itu pun dilontarkan Komisioner OJK, Muliawan D. Hadad di acara Seminar "Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan" yang diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo pada Jakarta, 1 Juni 2016, lalu.

"Sekuritisasi SRG ini menjadi penting dilakukan karena sektor pertanian sering dianggap *unbankable* oleh perbankan. Sehingga petani sulit memperoleh akses pendanaan dari Perbankan," tandas Muliawan D. Hadad.

Hal senada juga dilontarkan Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto, yang mengatakan, jika sekuritisasi SRG bisa berjalan akan menarik pendanaan dari pasar modal ke sektor pertanian.

Salam!!!



2018 OJK Targetkan Sekuritisasi SRG

Sistem Resi Gudang- SRG semakin populer saja di kalangan masyarakat Indonesia dan mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan implementasinya. Tak luput Otoritas Jasa Keuangan- OJK berencana melakukan sekuritisasi SRG di tahun 2018.

Wacana sekuritisasi SRG itu dilontarkan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad di acara Seminar "Meningkatkan Kepercayaan Sistem Resi Gudang Melalui Lembaga Penjaminan" yang diselenggarakan oleh Perum Jamkrindo pada Jakarta, 1 Juni 2016, lalu. Dalam pemberitaan **Buletin Bappebti** beberapa waktu lalu, Perum Jamkrindo telah

ditunjuk pemerintah sebagai lembaga penjaminan sistem resi gudang melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016, tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG.

Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, dalam sambutannya di acara itu mengatakan, "kami berharap SRG ke depan bisa digiring ke pasar modal untuk dijadikan sebagai alat atau sumber

pendanaan dengan cara disekuritisasi."

Hadir dalam acara seminar Sistem Resi Gudang yang pertama kalinya diselenggarakan Perum Jamkrindo antara lain Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, Dirut Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto, Dirut Jakarta Futures Exchange, Stephanus Paulus Lumintang, serta sejumlah *stakeholder* SRG lainnya.

"Dengan begitu, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sekuritisasi resi gudang untuk sektor komoditas," terang Muliaman D. Hadad.

Menurut Muliaman, sekuritisasi menjadi penting dilakukan karena sektor pertanian sering dianggap *unbankable* oleh Perbankan. Sehingga petani sulit memperoleh akses pendanaan dari Perbankan.

Di samping itu, keterbatasan permodalan tersebut tidak hanya terjadi di sektor pertanian, sektor lainnya seperti nelayan juga terjadi. Sehingga membuat posisi daya tawar petani dan nelayan menjadi lemah saat panen raya tiba. "Saat ini kontribusi pertanian terhadap PDB hanya mencapai sekitar 14 %. Namun, sektor pertanian menjadi aset penting bagi perekonomian Indonesia, sebab mampu menyerap sekitar 38 juta penduduk atau 31 % dari angkatan tenaga kerja," katanya.

Lebih jauh dijelaskan Muliaman, untuk menggiring sekuritisasi resi gudang di pasar modal, kita perlu duduk bersama untuk menyusun cetak biru. "Saya berharap dalam waktu dekat penyusunan cetak biru sekuritisasi resi gudang itu sudah bisa dilakukan."

"Sehingga sekitar dua tahun ke depan kita sudah bisa menjalankan sekuritisasi SRG tersebut di pasar modal. Karena itu, sosialisasi dan edukasi tentang SRG perlu ditingkatkan karena pengetahuan masyarakat terhadap SRG masih sangat rendah," tandas Muliaman D. Hadad.

Menanggapi wacana yang dilontarkan Komisioner OJK itu, Dirut PT Kliring

Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto, menyambutnya dengan positif. Dikatakannya, "bukan 'kah ini yang diinginkan pemerintah? Yakni membawa SRG kepada jalur bisnis yang menarik bagi masyarakat khususnya investor pasar modal.

"Sekuritisasi SRG itu sangat strategis, dan potensi bisnisnya cukup besar," tambahnya. "Kalau sekuritisasi SRG itu bisa berjalan, maka sektor pertanian akan dengan mudah diperoleh pendanaan dari pasar modal," ujar Tris Sudarto.

Kurangi Praktik Tengkulak

Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, dalam sambutannya juga mengatakan, SRG bisa meminimalisir atau memotong sistem perdagangan petani ke jalur tengkulak. Pasalnya, dengan SRG petani bisa menaruh barangnya ke Gudang SRG tanpa ketakutan barangnya tidak laku. "Apalagi barang atau komoditi petani kini sudah dijamin oleh Perum Jamkrindo," katanya.

"Kita menyadari bahwa selama ini banyak tengkulak atau perantara membeli dari petani, peternak dan nelayan, sehingga harga yang didapat petani relatif murah, sementara harga ke konsumen tinggi. Mata rantai panjang perdagangan yang cukup panjang inilah yang mengakibatkan kita banyak kesulitan untuk memperoleh harga komoditi di tingkat yang wajar," kata Thomas Lembong.

Selain itu, tambahnya, dengan adanya SRG bisa mengontrol harga komoditi di pasar tidak berfluktuatif terutama di saat cuaca atau kondisi musim tidak mendukung. "Artinya, jika ada musim yang menyulitkan petani, stok barang milik petani masih ada di gudang dan ini akan membuat harga tidak naik akibat jomplangnya *suplai and demand*," terangnya.

"Kalau kita bisa membenahi sistem ini, kita juga bisa menjembatani perselisihan musim yang membuat harga fluktuasi



karena kondisi cuaca," jelasnya.

Sebab itu, Thomas Lembong, berharap SRG dapat terus di implementasikan oleh petani. Setelah panen dan produksi, petani bisa langsung menyimpan barang di gudang.

"Dengan mendapatkan Resi Gudang dari Pengelola Gudang, petani bisa memanfaatkannya untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan. Dan pembiayaan itu bisa digunakan untuk keperluan para petani," ucap Thomas T. Lembong.

Sementara itu, Dirut Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, kepada media mengatakan, potensi bisnis penjaminan SRG pertahunnya bisa mencapai Rp 2 triliun. "Melihat potensi bisnis pergudangan dan komoditi SRG yang mencapai 14 jenis, paling sedikit kami bisa menjamin Rp 2 triliun," katanya.

Nilai penjaminan itu akan terus berkembang, seiring dengan upaya Bappebti menambah panjang daftar

komoditi yang akan dijamin Perum Jamkrindo nantinya. Sebagai informasi, saat ini telah ada sebanyak 14 jenis komoditi yang boleh disimpan dalam gudang SRG, yakni karet, jagung, gabah, beras, kopi, kakao, lada, rumput laut, rotan dan garam, timah, gambir, teh dan kopra. Namun Diding menyampaikan, bisnis penjaminan resi gudang ini belum bisa berjalan, karena amanah PP 1/2016 mewajibkan adanya penyertaan modal negara- PMN ke Jamkrindo. "Kami bisa menjalankan penjaminan SRG kalau sudah ada PMN. Karena itu kami berharap PNM itu secepatnya bisa direalisasikan. Dari informasi yang kami peroleh, dalam pembahasan APBN-P 2016 dengan legislatif, PMN untuk Jamkrindo sudah dimasukan. Ancar-ancarnya sekitar Rp 700 miliar di tahun 2016. Kalau PMN itu sudah ada, maka kami bisa langsung melaksanakan tugas sebagai LPP-SRG," ujar Diding S. Anwar.



Dumoly F. Pardede : SRG, KUR dan LKM Untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia

Perum Jamkrindo pasca ditunjuk sebagai lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang, langsung 'tancap gas' lakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Kota Medan dan Parapat, Provinsi Sumatera Utara, menjadi pilihan pertama dari 9 kantor perwakilan Perum Jamkrindo yang sudah direncanakan hingga akhir tahun 2016.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016, tentang, lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang, yang menunjuk Perum Jamkrindo melaksanakan tugas tersebut langsung bergerak cepat menggaungkan skema SRG. Pilihan pertama sosialisasi

SRG dilakukan di Sumatera Utara sebagai Kantor Wilayah I Jamkrindo. Tema yang diangkat yaitu, "Sosialisasi Penjaminan Sistem Resi Gudang- SRG, Kredit Usaha Rakyat- KUR dan Lembaga Keuangan Mikro- LKM". Kegiatan tersebut digelar selama dua hari, yakni pada 16 Juni 2016

di Kota Medan, dan 17 Juni 2016, di kota wisata Parapat, Kab. Simalungun.

Sosialisasi ini mengundang para pelaku usaha komoditi, UMKM, perbankan dan akademisi. Sedangkan narasumbernya yakni perwakilan Kementerian BUMN, Bandung Pardede; Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Retno Rukmawati, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudiarto, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan- OJK, Suparlan, Perwakilan OJK Sumatera Utara, Irfan Sitanggang, BRI Kanwil Medan, Frans Hari Sistiasto dan perwakilan Jamkrindo, Loesdarwanto.

Selain itu, hadir Sekretaris Bappebti, Didi Sumedi yang membacakan sambutan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong. Dalam sambutannya, Thomas Lembong, mengatakan, "Sumatera Utara sudah selangkah menjadi pelopor implementasi SRG di tanah air. Sebab, dari 14 komoditi SRG, hampir seluruhnya ada di wilayah Sumut dan berorientasi ekspor," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016, terdapat 14 komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG. Diantaranya, gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, timah, gambir, teh, serta kopra.

Sementara itu, Deputi Komisioner Industri Keuangan Non-Bank OJK, Dumoly F. Pardede, dalam sambutannya membuka sosialisasi SRG itu, mengatakan, kegiatan sosialisasi program pemerintah seperti SRG, Kredit Usaha Rakyat- KUR dan Lembaga Keuangan Mikro- LKM sangat penting agar program-program tersebut bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

"Sejauh ini, pengetahuan masyarakat akan SRG, KUR dan LKM masih kurang," katanya.

"Saya tegaskan, tahun depan SRG, KUR dan LKM sudah bisa berjalan dengan cepat, khususnya di Sumatera Utara. Sehingga bisa berkembang untuk menghilangkan para rentenir dan

tengkulak. Karena dari laporan yang saya terima, tiga skema pembiayaan yang langsung menyentuh masyarakat petani itu, belum berjalan sama sekali di Sumatera Utara, ini," terang Dumoly Pardede.

Menurut Dumoly, nilai ekonomi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penjaminan SRG oleh Jamkrindo adalah sangat besar. Apalagi, hasil komoditi nasional berlimpah ruah dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. "Karena itu, saya akan mendorong Pemda dan pengusaha Sumut untuk menjalankan SRG untuk mengamankan harga komoditas pertanian, khususnya yang berbasis ekspor yang dalam beberapa tahun belakangan mengalami tekanan.

"Potensi untuk menjalankan SRG di Sumut sangat tinggi, karena produksi komoditas pertanian sangat banyak. SRG sangat bermanfaat bagi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Dumoly.

Meski tergolong baru, tambahnya, SRG merupakan terobosan yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha dalam sistem tata niaga komoditas pertanian. SRG juga merupakan sistem yang paling aman dan canggih jika dibandingkan dengan beberapa sistem yang pernah ada di Indonesia.

"Sistem ini mirip dengan sistem tunda jual yang dikenal petani, hanya saja lebih canggih dan aman serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit dan transaksi lainnya," jelasnya. Dan untuk menjalankan SRG, lanjutnya, harus mendapat dukungan dari kepala daerah.

FGD

Dalam penjelasan Deputi Komisioner Industri Keuangan Non-Bank OJK, Dumoly F. Pardede, kepada **Buletin Bappebti**, pihaknya akan menginisiasi diselenggarakannya *focus group discussion*- FGD dalam waktu dekat ini untuk membahas mengenai SRG. Selain OJK, pihak yang akan diundang adalah Bappebti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN,



Sekretaris Bappebti, Didi Sumedi menyampaikan sambutan Menteri Perdagangan, Thomas T. Lembong.

Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Indonesia. Tujuannya agar kita fokus, siapa melakukan apa dan hasilnya seperti apa," terang Dumoly.

Kalau kita hanya berpangku tangan dan menunggu pemerintah daerah, tambahnya, SRG ini tak akan jalan-jalan. "Karena kami juga berharap SRG ini dapat berjalan bersamaan dengan KUR dan LKM," ujar Dumoly.

"Ekonomi Tiongkok bisa maju karena mereka sadar akan potensi pasar dalam negerinya dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal yang sama

seharusnya bisa kita lakukan, karena Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Maka strategi yang harus dilakukan adalah menggerakkan ekonomi rakyat dipedesaan melalui SRG, KUR dan LKM," papar Dumoly.

Kalau perekonomian rakyat berbasis pedesaan sudah merata, tambahnya, maka tak akan terjadi lagi kesenjangan dan urbanisasi. "Jadi, SRG, KUR dan LKM ini akan terus kita genjot untuk kemakmuran rakyat," tandas Dumoly F. Pardede.



Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Gudang SRG di Kab. Indramayu antara PT Food Station Tjipinang Jaya dengan PD Bumi Wiraloka Indramayu dan CV Sandy Jaya, pada 16 Februari 2016, lalu.

'Macan' SRG Indramayu Bangkit

Sistem Resi Gudang- SRG di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, mulai menggeliat. Dua unit gudang SRG berbenah dan bangkit sebagai barometer lumbung padi nasional.

Pada masa awal implementasi SRG di Indonesia, Kab. Indramayu tercatat sebagai *pioneer* dan cukup berhasil dalam menerapkan instrumen SRG. Di daerah ini terdapat dua gudang SRG. Pertama, gudang SRG milik PT Pertani (Persero) yang terletak Kec. Haurgeulis. Kala itu, gudang milik PT Pertani tercatat sebagai barometer SRG di Indonesia. Maka tak heran, jika gudang SRG Haurgeulis menjadi tempat belajar atau studi banding untuk daerah-daerah lain yang ingin belajar tentang SRG.

Adapun gudang SRG yang kedua di Indramayu terletak di Kecamatan Losarang. Gudang ini adalah milik Pemerintah Daerah Indramayu yang dibangun bersama Bappebti dengan Dana Stimulus Fiskal Tahun 2009.

Seiring berjalannya waktu, implementasi SRG di Indramayu mulai redup dan padam. Bahkan sempat tak beroperasi. Pasalnya, ada mismanajemen.

Cukup miris memang, padahal di awal implementasi SRG dari Kab. Indramayu-lah daerah-daerah lain mendapatkan pelajaran tentang praktik SRG.

Namun, diakhir tahun 2015, lalu, ada kabar yang cukup membahagiakan. Gudang SRG yang ada di Kec. Losarang menunjukkan kembali sinyal perbaikan dengan manajemen yang lebih baik.

Seperti dijelaskan Kepala Bagian Pemberdayaan dan Penguatan SRG, Bappebti, Yuli Edi Subagio, yang mengatakan, kebangkitan SRG di Kab. Indramayu ditandai dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah Indramayu dengan PT Food Station Tjipinang Jaya- FSTJ selaku Pengelola Gudang SRG di pasar beras terbesar di Indonesia, dan Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu- PD BWI selaku Calon Pengelola Gudang SRG yang ada di Kec. Losarang.

"Ketiga pihak itu sudah bersepakat

dan ingin segera mengimplementasikan gudang SRG untuk suplai beras konsumsi masyarakat DKI Jakarta," beber Edi Subagio

Kabar terbaru yang diperoleh dari Edi Subagio, dikatakan, Gudang SRG yang terletak di Losarang pada 20 Mei 2016 telah menerbitkan 2 Resi Gudang dengan volume 94 ton gabah dengan nilai Rp 419.873.000,-

"Saat ini, resi tersebut masih dalam proses pembiayaan dari Bank BJB Cabang Indramayu. Kami sangat mengapresiasi penerbitan 2 resi itu, dan diharapkan awal kebangkitan kembali SRG di Indramayu serta menjadi barometer SRG di Indonesia," ujar Edi, optimis.

Target 2.000 ton

Tak hanya di Losarang, menurut penjelasan Edi Subagio, dikatakan, di Indramayu terdapat perusahaan yang bergerak dalam jual-beli beras

termasuk melakukan bisnis penggilingan beras, yaitu CV. Sandy Jaya- SJ. Semula perusahaan ini merupakan pengguna SRG di Gudang SRG Haurgeulis. Namun karena gudang SRG Haurgeulis tak lagi beroperasi, maka manajemen CV. SJ yang terletak di Desa Karangsinom, tergerak ingin menjadikan gudang miliknya menjadi gudang SRG.

Keinginan CV. SJ menjadi Pengelola Gudang SRG, cukup beralasan. Sebab, CV. SJ memiliki koperasi yang bernama Koperasi Sandy Jaya Tani. Dan anggota koperasi ini sangat berharap dapat memperoleh akses pembiayaan melalui SRG. Selain itu, dengan adanya SRG, CV. SJ juga ingin tetap dapat menjaga kontinuitas pasokan stok untuk pelanggannya.

Hal lainnya, ungkap Edi, keinginan CV. SJ masuk SRG karena perusahaan ini sangat terganggu dengan kedatangan beberapa pihak yang melakukan pengawasan pangan yang menyatakan pihaknya melakukan penimbunan barang.

"Akhirnya, keinginan CV. SJ itu terwujud. April 2016, lalu, Gudang SRG CV. Sandy Jaya secara resmi mendapat persetujuan sebagai Gudang SRG dengan Pengelola Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya," kata Edi Subagio.

Penerbitan perdana Resi Gudang di CV. Sandy Jaya dilaksanakan pada 20 Mei 2016, lalu, yakni sebanyak 2 resi dengan volume 614,55 ton gabah senilai Rp 2.765.475.000. Saat ini, resi dalam proses pembiayaan oleh Program Kemitraan Bina Lingkungan- PKBL PT. Kliring Berjangka Indonesia- PT KBI.

"Menurut manajemen CV. Sandy Jaya, ditargetkan sepanjang tahun ini gabah yang masuk ke gudang SRG sekitar 2.000 ton gabah," beber Edi.

Lumbung Pangan

Kab. Indramayu tercatat sebagai daerah pertanian yang sangat luas dan merupakan sentra produksi pangan di Indonesia. Data tahun 2015, lalu, luas areal sawah mencapai 117.792

hektar, terdiri dari sawah irigasi, tadah hujan dan rawa/lebak. Adapun produksi padinya mencapai 1.444.507 ton gabah kering giling atau setara 906.283 ton beras. Sedangkan konsumsinya sebesar 173.997 ton beras, sehingga masih surplus 703.095 ton beras. Surplus beras inilah yang dikirim pedagang dan pelaku usaha ke daerah lain untuk memenuhi stok pangan.

Di sisi lain, keberadaan Waduk Jatigede Sumedang, membawa dampak positif pada sistem pengairan bagi pertanian di Indramayu. Daerah ini dapat memperkuat pertaniannya dengan sistem irigasi yang terkontrol dengan baik, sehingga petani dapat memanfaatkan lahan seoptimal mungkin, bahkan dapat memanen padinya hingga 3 kali dalam setahun.

Sebagai daerah lumbung pangan, tentunya banyak penduduk Indramayu yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, baik sebagai petani penggarap, petani penyewa maupun sebagai petani pemilik lahan. Tapi sayangnya, Indramayu dalam mata rantai perdagangan beras justru kerap dirugikan. Bahkan, daerah ini pada waktu tertentu sempat juga kekurangan beras.

Menurut analisis Yuli Edi Subagio, hal ini disebabkan ketika musim panen banyak pembeli, pengumpul, pedagang maupun pelaku usaha dari daerah lain seperti Jawa Barat, DKI Jakarta maupun Jawa Tengah yang datang membeli gabah petani di Indramayu. Kemudian, mereka menggiling menjadi beras didaerahnya dan sebagian berasnya balik lagi ke Indramayu.

"Karena itu, implementasi SRG di Indramayu memang sangat penting dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan petani yang saat ini tidak mempunyai daya tawar tinggi, terutama ketika harga jatuh. SRG juga membantu petani dalam permodalan untuk proses produksi selanjutnya dan memenuhi kebutuhan hidup," katanya.

"Dengan SRG, hasil panen dapat dijual pada harga yang bagus dan SRG membantu dalam mekanisme stabilisasi

harga, sehingga peran pemerintah dalam melakukan upaya stabilisasi harga dengan operasi pasar dapat dikurangi," terang Edi Subagio.

Stabilitas Pasokan

Kab. Indramayu sejatinya memiliki kekuatan besar dalam SRG. Sebab, karena daerah ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, gudang SRG di Indramayu juga memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang cukup bagus dalam memproduksi beras.

Agaknya, potensi itulah yang memotivasi PT Food Station Tjipinang Jaya- FSTJ sebagai BUMD Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki tugas dan tanggungjawab menjaga stabilitas pasokan pangan di Ibukota Indonesia.

Karena itu, FSTJ termotivasi mengelola dua gudang SRG di Indramayu yaitu Gudang SRG di Losarang milik Pemda Indramayu dan gudang milik CV. Sandy Jaya di Karangsinom. Perusahaan swasta ini memiliki 2 unit gudang dengan kapasitas 2.000 ton gabah, *dryer* berkapasitas 180 ton gabah kering panen dan *rice milling unit*- RMU berkapasitas 80 ton beras per hari.

"Sebagai Pengelola Gudang SRG, PT FSTJ mempunyai kekuatan besar menguasai pasar perberasaan di Jakarta dan sekitarnya. Dan diharapkan PT FSTJ dapat membantu transfer pengetahuan dalam manajemen gudang, proses penerbitan resi gudang dan yang tidak kalah penting adalah membantu aspek pemasaran beras termasuk jaringan pemasaran," ujar Edi Subagio, optimis.

"Dan tak hanya itu, PT FSTJ juga dapat berperan sebagai *standby buyer*. Yakni, membeli gabah dari petani yang menyimpan komoditi di gudang SRG untuk stok pangan DKI Jakarta. Semoga saja, dengan kehadiran para pelaku-pelaku SRG itu dapat membangunkan 'Macan SRG' Indramayu yang cukup lama tertidur," harap Yuli Edi Subagio.



Indonesia Bakal Gandeng Vietnam Kendalikan Harga Kopi Dunia

Indonesia rencananya akan menggandeng Vietnam untuk menjadi penentu harga kopi dunia. Bursa Berjangka di Indonesia memiliki peluang dan peran penting untuk mewujudkannya.

Indonesia dan Vietnam dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir kopi terbesar di dunia. Tercatat, Indonesia saat ini berstatus sebagai negara pengeksport kopi terbesar ke-4 di dunia dengan jumlah produksinya yang mencapai 600.000 ton. Sedangkan Vietnam dikenal sebagai eksportir kopi nomor 2 dunia dengan jumlah produksi sekitar 1,1 juta ton.

Meski begitu, ironisnya bukan Indonesia maupun Vietnam yang menentukan harga untuk komoditas tersebut. Justru harga kopi dikendalikan oleh negara-negara yang bukan penghasil kopi. Untuk diketahui, kopi robusta dikendalikan harganya oleh bursa berjangka di London, Inggris, sedangkan kopi arabika dikendalikan bursa New York di Amerika Serikat.

Akibatnya, posisi tawar negara-negara eksportir kopi menjadi lemah.

Bahkan saat pasokan kopi di pasar dunia kurang, harga kopi bisa ditekan rendah. Imbasnya, negara-negara eksportir kopi seperti Indonesia pun dirugikan.

"Negara-negara yang bukan penghasil kopi tersebut justru memegang kendali, bahkan di saat terjadi kekurangan pasokan kopi di pasar dunia, harga kopi bisa mereka tekan. Kita ini kekurangan suplai kopi di pasar dunia, harusnya kan harga tinggi. Itulah hebatnya mereka," ujar Wakil Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia- AEKI, Pranoto Soenarto, dalam sebuah diskusi perkopian Indonesia di Jakarta, 3 Juni 2016, lalu.

Memang tak mengherankan, negara-negara yang selama ini jadi penentu harga kopi merupakan negara pengimpor kopi. Jadi, amat wajar jika produsen menggunakan acuan harga dari negara-negara konsumennya, maka harga pun kerap merugikan si produsen.

Karena itu, Pranoto mengatakan, untuk melepaskan diri dari kendali negara-negara asing ini, Indonesia berniat membuat pasar fisik kopi di bursa berjangka di Indonesia. "Agar pengendaliannya bisa lebih kuat, Indonesia bakal menggandeng Vietnam, negara tetangga yang juga sesama eksportir kopi utama dunia," katanya.

"Mereka nggak punya barang tapi menentukan harga. Yang saya mau bursanya di Jakarta, kita bisa ikut menentukan. Kalau pasar fisik komoditi timah bisa dilakukan di Indonesia, kenapa kopi nggak?" ujar Pranoto.

Dia menambahkan, nantinya eksportir kopi harus diwajibkan menjual barangnya melalui bursa berjangka di dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi tuan di rumah sendiri dan ikut mengendalikan harga.

"Vietnam juga sudah bilang mereka akan dukung kita untuk punya fisik di Indonesia. 2-3 tahun lalu mereka sudah janji mau jual kopi lewat bursa berjangka di Indonesia," ungkap Pranoto.

Menurutnya, hukum di Vietnam tidak mengizinkan adanya bursa berjangka di dalam negerinya. Ini kesempatan besar bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan Vietnam dalam pengendalian harga kopi. Bila proses pembentukan pasar fisik kopi di di Indonesia berjalan lancar, Pranoto berjanji akan segera melobi Vietnam. "Vietnam itu tidak boleh melakukan bursa berjangka karena dilarang di hukumnya. Kalau ini sudah matang, saya berangkat melobi Vietnam," tuturnya.

Nantinya, jika Indonesia bisa meningkatkan harga kopi di pasar dunia, tentu para petani kopi di dalam negeri bisa lebih sejahtera. Karena itu, rencana pengendalian harga kopi melalui bursa berjangka di dalam negeri perlu segera direalisasikan. "Bursa kopi di Indonesia harus terealisasi, ini kesempatan, target saya jadi 3 bulan. Kalau bursa kopi ada di Jakarta, kita yang menentukan harga," tandasnya.

Mencegah masuknya uang haram hasil tindak kejahatan atau lebih dikenal dengan *money laundering* ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi-PBK, Bappebti giat memasyarakatkan Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016, tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, dalam mendukung program anti pencucian uang- APU dan pencegahan pendanaan terorisme- PPT. Peraturan ini telah ditetapkan oleh Bappebti pada 18 Mei 2016.

"Perdagangan berjangka komoditi selama ini telah menerapkan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer- KYC*. Namun, sesuai dengan perkembangan global ketentuan KYC perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," ujar Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, dalam sambutannya pada sosialisasi Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, dikalangan pelaku usaha PBK di Bandung, Jabar, pada 22 Juni 2016.

Menurut Bachrul, Perka Bappebti tersebut dibuat dengan mengadopsi rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF* atau dikenal sebagai Rekomendasi 40+9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Terdapat penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi KYC atau prinsip mengenal nasabah, berubah menjadi terminologi *Customer Due Dilligence- CDD*.

"Alhamdulillah, sampai saat ini kami belum menemui ada PPT di perusahaan pialang berjangka. Dan semoga jangan sampai terjadi. Sebab itu peranan pialang berjangka dalam menerapkan program APU dan PPT dioptimalkan dan diefektifkan, sehingga mencegah



PBK Harus Bebas Money Laundering

perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme," tegas Bachrul Chairi.

Seperti pernah diberitakan **Buletin Bappebti**, beberapa pokok peraturan yang tercakup dalam Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, adalah pertama, penggunaan istilah CDD untuk menyempurnakan prinsip mengenal nasabah dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah. Kedua, kewajiban pialang berjangka untuk menyusun, memastikan, menerapkan, dan mematuhi pedoman ketentuan prinsip mengenal nasabah. Ketiga, penggunaan pendekatan berdasarkan risiko dalam penerapan program APU dan PPT.

Sementara itu, dalam kegiatan sosialisasi Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, juga dihadirkan narasumber antara lain, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, Kepala Bagian Audit, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Bappebti, Widiastuti, serta, Ketua Kelompok Kerjasama Luar Negeri

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- PPATK, Syahril Ramadhan.

Dalam paparannya, Sri Hariyati, antara lain mengatakan, direktur utama dari sebuah perusahaan pialang berjangka harus menerapkan prinsip mengenal nasabah. "Karena itu, seorang direktur utama mempunyai wewenang untuk memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah," katanya.

"Untuk menjalankan kewenangan itu, direktur utama memiliki tugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah. Namun, tugas yang paling pokok dilakukan seorang direktur utama adalah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan- TKM kepada PPATK," ucap Sri Hariyati.

Lebih jauh dikatakan Sri Hariyati, setiap perusahaan pialang berjangka yang lalai menyampaikan TKM akan dikenakan sanksi oleh PPATK berupa teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan dan sanksi denda administratif



Pasar Lelang Cabai Siborong-borong Mencuat Tanpa Disokong

Pemkab Tapanuli Utara berhasil membuat terobosan baru dengan menyelenggarakan pasar lelang spot komoditi cabai merah di Pasar Siborong-borong. Langkah ini terbukti berhasil melawan praktik ijon yang kerap merugikan petani.

Kehadiran pasar lelang spot komoditi cabai di Kabupaten Tapanuli Utara memang patut diapresiasi. Pasalnya, kegiatan itu terselenggara secara mandiri yang digagas pemerintah daerah bersama instansi terkait. Meski belum lama terbentuk, pasar lelang ini terbukti memperpendek mata rantai perdagangan cabai merah dan menekan praktik ijon yang mencengkram para petani.

Menurut M. Junaifin, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sibolga, secara gamblang menuturkan, inisiasi terselenggaranya pasar lelang itu berawal melimpahnya produksi cabai dari tiga kelompok tani binaan Bank Indonesia yang ada di Kecamatan Siborong-borong. "Karena praktik ijon masih merajalela, maka harga cabai cenderung tertekan di saat panen raya. Itulah sebabnya kami menggagas diselenggarakan pasar lelang," katanya. "Kecamatan Siborong-borong memang

berada di bawah BI Perwakilan Sibolga. Kami sudah bekerja keras membina mereka dan hasilnya cukup bagus. Namun justru keuntungannya diperoleh si pengijon. Karena, saat harga cabai di pasaran pernah mencapai Rp 60.000 hingga Rp 70.000 per kg, namun di tingkat petani cuma dihargai Rp 13.000 – Rp 15.000 per kg. Ini 'kan sungguh tidak masuk akal. Bahkan harga yang didapatkan pengijon bisa lebih tinggi jika barang tersebut dipasarkan keluar Sumut seperti ke Riau dan Sumbar," terang Junaifin.

Pasar lelang cabai Siborong-borong, sejak penyelenggaraannya perdana pada 21 Maret 2016, lalu, telah melelang sekitar 18 ton cabai merah dengan nilai Rp 453.625.570. Hingga Juni 2016, pasar lelang cabai telah diselenggarakan sebanyak 14 kali yang digelar setiap hari Senin.

Asisten II Setda Kabupaten Taput, Parsaoran Hutagalung, kepada media

mengatakan, salah satu kunci sukses pasar lelang cabai Siborong-borong berkat adanya pemahaman dari para petani dan kerja keras dari berbagai instansi. "Sehingga dominasi praktik ijon bisa dikurangi. Karenanya, saat ini petani dalam setiap penyelenggaraan pasar lelang sudah membawa sendiri hasil panennya," katanya.

"Harapan kami kedepannya pasar lelang Siborong-borong ini semakin berkembang dan mampu memasarkan sekitar 6.000 ton produksi cabai merah setiap tahunnya," kata Parsaoran.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, dalam sambutannya saat penyelenggaraan pasar lelang cabai ke 14 pada 20 Juni 2016, lalu, mengatakan, pasar lelang Tapanuli Utara ini adalah sebuah keberanian untuk memulai. Karena dalam benak saya, harus ada terobosan yang dilakukan kepada masyarakat agar termotivasi untuk bertani," tegasnya.

"Akhirnya saya langsung tegaskan untuk membuat pasar lelang, langsung berjalan tanpa harus menunggu ini dan itu. Ternyata kegiatan ini sangat bergeliat, dan menyentuh langsung masyarakat petani sehingga mendapat sambutan baik dari masyarakat karena mendapatkan harga terbaik untuk komoditi cabai merahnya," ucap Nikson Nababan.

Melihat antusiasnya para petani bercocok tanam cabai, Nikson Nababan juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk memberi pupuk bersubsidi yang dibayar pasca panen. Di samping itu, pihaknya juga menganggarkan subsidi harga bagi masyarakat petani jika harga cabai mencapai titik terendah.

"Langkah ini kami lakukan dengan harapan agar masyarakat petani tetap termotivasi untuk bertani tanpa ada rasa takut untuk merugi," tegas Nikson Nababan.

Di pihak lain, Kepala BI Provinsi Sumut, Difi A. Johansyah, mengungkapkan, keberhasilan Pemkab Tapanuli Utara dalam menyelenggarakan pasar lelang cabai akan menjadi pemicu bagi



pemda lainnya di Sumatera Utara untuk menggulirkan program serupa.

"Pasar lelang ini tercipta guna meningkatkan harga jual petani yang otomatis memandirikan mereka. Selama ini, kendala dalam mengatasi lonjakan harga cabai karena produksi dikirim keluar Sumut. Itu karena petani tidak komit dan menjual hasil tanamannya ke tengkulak," katanya.

Alhasil, petani akan mendapatkan harga murah, konsumen pun kemudian membelinya dengan harga sangat mahal. Imbasnya, inflasi tidak bisa terjaga. "Dengan pasar lelang, petani tidak lagi memiliki ruang berhubungan dengan tengkulak," ucap Difi A. Johansyah.

Ikon Pasar Lelang

Kabar keberhasilan pasar lelang cabai Siborong-borong rupanya membuat penasaran pemerintah pusat. Karena itu, pada penyelenggaraan pasar lelang ke 14 sejumlah pejabat perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia melakukan peninjauan langsung ke pasar lelang Siborong-borong.

Dan dari hasil kunjungan itu, semua perwakilan instansi dari pemerintah pusat ini memberikan pujian. Salah satunya yaitu Kepala Bagian Pengawasan Pasar Lelang Bappebti, Sentot Komarudin. Dia katakan, pasar lelang cabai Siborong-borong dapat dijadikan ikon pasar lelang spot di Indonesia.

"Kami benar-benar salut akan terobosan Bupati Nikson Nababan yang benar-benar memberikan perhatian akan berjalannya pasar lelang ini. Menurut saya, pasar lelang cabai Siborong-borong, ini, dapat dijadikan ikon pasar lelang Indonesia. Karena terselenggara secara mandiri dan mendapat dukungan dari masyarakat petani," ungkap Sentot.

Menurut Sentot Komarudin, salah satu kunci sukses terselenggaranya pasar lelang spot, adalah penyelenggaraannya yang konsisten dan diikuti banyak peserta. "Pasar lelang siborong-borong ini sungguh luar biasa, kami akan laporkan hasil kunjungan ini ke Presiden melalui pimpinan kami, serta hasilnya akan kami kirimkan ke Pemkab," tuturnya.

Tak hanya itu, Sentot Komarudin juga berinisiatif akan mengadopsi sistem penyelenggaraan pasar lelang cabai Siborong-borong untuk diterapkan di pasar lelang komoditi yang diselenggarakan sejumlah pemerintah daerah.

"Peran kepala daerahnya sangat luar biasa dan kami yakin pasar lelang Tapanuli Utara ini akan meledak, karena kami nilai sangat bagus dan komprehensif. Tanpa di suport dari pusat saja sudah bisa berkembang dan ini merupakan inovasi yang luar biasa. Seperti istilah Pak Jokowi, 'out of the box' yang memberi manfaat untuk peningkatan perekonomian secara nasional," tandas Sentot Komarudin.



Sarasehan Hukum dan Investasi Berjangka

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan (Rorundak) Bappebti, Sri Hariyati mewakili Kepala Bappebti menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam acara Sarasehan Hukum dan Investasi Berjangka yang diselenggarakan oleh Polda Kalimantan Barat, di Kalimantan Barat, Kamis (23/6).

Acara ini merupakan rangkaian peringatan Hut Bhayangkara RI ke-70 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, membangun komitmen bersama, menyamakan persepsi, melakukan pengkajian dan peran nyata para pihak terkait perdagangan berjangka.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Hariyati memaparkan materi mengenai Legalitas Pelaku Pasar Investasi Berjangka dan Isu Krusial Penyimpangan saat ini. Narasumber dalam acara tersebut yaitu Kepala Biro Rorundak Bappebti, OJK, dan Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri dengan peserta yang terdiri dari Jajaran Polda Kalbar, Penyedia Jasa Keuangan, Koperasi, unsur TNI, Pemprov Kalbar, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Pengusaha dan Investor.



Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Satgas Waspada Investasi

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi mewakili Menteri Perdagangan, Thomas T. Lembong bersama dengan Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman Hadad, Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Kapolri Jend Polisi Badrodin Haiti, Kepala BKPM Franky Sibarani, Perwakilan dari Menkominfo, Perwakilan dari Menkop dan UKM menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (21/06).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappebti juga membacakan sambutan Menteri Perdagangan. Dia menyampaikan, dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini, Kementerian Perdagangan mendukung penuh adanya Satgas Waspada Investasi sebagai forum koordinasi 7 lembaga atau institusi dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang berpotensi melawan hukum, sehingga



mengakibatkan kerugian masyarakat.

Anggota Satgas Waspada Investasi saat ini terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kemendag, Kominfo, Kemenkop dan UKM, dan BKPM. Untuk Kementerian Perdagangan terdiri dari 2 unit Eselon I, yakni Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Bappebti.



Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka di Semarang

Bappebti mengadakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka Komoditi (CWPBK) di Hotel Horison, Semarang, 2-3 Juni 2016. Ujian ini adalah Ujian Profesi Angkatan Kedua di tahun 2016.

Sekretaris Bappebti Kemendag Didi Sumedi didampingi Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi Publik, Taufik hadir dalam acara ini untuk memberikan pengarahan kepada peserta ujian sekaligus membuka acara ujian ini.

Ujian Profesi CWPBK diadakan 2 hari dalam 2 tahap; Ujian Tertulis dan Ujian Wawancara. Tahap pertama adalah Ujian Tertulis yang dilaksanakan pada hari Kamis dan diikuti oleh 63 peserta. Adapun peserta yang lolos ke tahap wawancara berjumlah 27 orang dari total 63 peserta ujian tertulis.



Sosialisasi Kebijakan Bappebti dalam Mencegah Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Kepala Bappebti Kemendag, Bachrul Chairi membuka sekaligus memberikan sambutan dalam acara sosialisasi Kebijakan Bappebti di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan tema "Industri PBK Bebas dari Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris" yang diselenggarakan di Hotel Hilton Bandung, Rabu (22/06).

Dalam sambutannya, Bachrul menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka atau lazim disebut *Customer Due Diligence* (CDD) dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Peraturan ini telah ditetapkan oleh Bappebti pada tanggal 18 Mei 2016.

Acara ini dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Dirut Bursa Berjangka, Dirut Lembaga Kliring Berjangka, Ketua dan Direktur Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) dan Dirut Perusahaan Pialang Berjangka.



Timah, Gambir, Teh dan Kopra Jadi Subjek Komoditi SRG

Optimalisasi penyimpanan barang atau komoditi melalui skema Sistem Resi Gudang- SRG, Menteri Perdagangan, Thomas T. Lembong, menerbitkan Permendag No. 35/M-Dag/Per/5/2016, tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/11/2011 tentang barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/2/2013, dan penggunaan resi gudang sebagai salah satu instrumen untuk memperkecil risiko serta pembiayaan, perlu mengatur kembali ketentuan jenis barang yang dapat disimpan di dalam gudang sistem resi gudang.

Ada pun komoditi yang menjadi subjek penyimpanan di gudang SRG yang diatur melalui Permendag No. 35/M-Dag/Per/5/2016, tersebut, yakni komoditi Timah, Gambir, Teh dan Kopra. Dengan adanya tambahan 4 jenis komoditi itu, maka

saat ini terdapat sebanyak 14 komoditi sebagai subjek SRG. Yakni komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, timah, gambir, teh dan kopra. Ketentuan itu dikeluarkan Kementerian Perdagangan pada 12 Mei 2016, lalu, dan efektif berlaku sejak 24 Mei 2016.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti, Retno Rukmawati, dalam sebuah kesempatan mengatakan, komoditas untuk dapat dijadikan sebagai subjek SRG harus merupakan usulan dari pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk stabilitas harga komoditi yang dimaksud.

"Tetapi keputusannya tetap ada pada Kementerian Perdagangan dengan mempertimbangkan manfaat ekonomisnya dan memiliki karakter harga berfluktuatif," terang Retno Rukmawati.

Polda Kalbar Bentuk Satgas Waspada Investasi



Polda Kalimantan Barat dalam rangka HUT Bhayangkara RI ke-70 yang jatuh pada 1 Juli 2016, menyelenggarakan sarasehan hukum dan investasi perdagangan berjangka komoditi pada 23 Juni 2016, di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi, membangun komitmen bersama, menyamakan persepsi, melakukan pengkajian dan peran nyata para pihak terkait dalam bidang perdagangan berjangka komoditi.

Kepala Biro Peraturan, Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Haryati, dalam materinya

memaparkan "legalitas pelaku pasar investasi berjangka dan isu krusial penyimpangan saat ini." Dan dalam sambutannya, Sri Haryati yang mewakili Kepala Bappebti, mengatakan, kegiatan sarasehan yang dilakukan Polda Kalimantan Barat patut diapresiasi. Sebab dengan adanya acara tersebut akan terjalin komunikasi dan koordinasi dalam penanganan isu-isu krusial di bidang perdagangan berjangka khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

Menurut Direktur Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol. Wawan Munawar, berbagai bentuk modus operandi yang digunakan oleh pihak pelaku pasar ataupun pelaku perorangan dalam menawarkan produk investasi berjangka, berdalih seolah-olah kegiatan usaha yang dilakukan memiliki legalitas badan usaha yang telah terdaftar pada lembaga yang membidangi bidang investasi berjangka seperti Bappebti dan OJK.

"Selain itu mereka berusaha meyakinkan para calon investor dengan memberikan keuntungan yang besar. Padahal tidak semudah yang difikirkan, sehingga banyaknya persoalan yang muncul setelah para investor bergabung," kata Wawan Munawar.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan sarasehan tersebut, Polda Kalbar merekomendasikan untuk membentuk Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari OJK Wilayah Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat, perwakilan Bappebti yang ditunjuk guna memberikan pengawasan dan perlindungan dalam pelaksanaan investasi berjangka komoditi.

KKP Gandeng Bappebti Wujudkan 9 Gudang SRG Garam

Kementerian Kelautan dan Perikanan- KKP menggandeng Bappebti dan PT Garam (Persero) untuk mewujudkan Sistem Resi Gudang- SRG garam di sebanyak sembilan daerah. Masing-masing di Kabupaten Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Pamekasan, Sumenep, Bima, Jenepono dan Pangkajene Kepulauan.

Kepala Bappebti Bachrul Chairi, mengatakan, komoditi garam sangat berpotensi untuk dimasukkan dalam gudang SRG, mengingat kondisi cuaca saat ini yang tak menentu mempengaruhi produksi petani garam.

"Dengan adanya SRG Garam, maka harga garam di tingkat petani garam dapat stabil," ujar Bachrul Chairi belum lama ini di Jakarta.

Jika garam petani dimasukkan ke gudang SRG, tambahnya, komoditas garam kian terjaga kualitasnya. Bahkan, secara nominal harga komoditas garam tidak mengalami penurunan yang bisa berakibat pada kerugian petani garam.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti, Retno Rukmawati, mengatakan, kebetulan KKP juga mempunyai program membangun sembilan gudang SRG khusus komoditi



garam. "Gudang garam itu dibangun di 9 kabupaten meliputi Kabupaten Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Pamekasan, Sumenep, Bima, Jenepono dan Pangkajene Kepulauan. Sembilan gudang itu akan dibangun KKP tahun ini juga," ungkapnya.

Retno juga menerangkan, selain membantu menerapkan SRG Garam, Bappebti juga akan menyusun Pedoman Operasional Baku- POB pengelolaan gudang khusus garam. "Sebab sampai saat ini belum ada standar pengelolaan garam di dalam gudang. Makanya untuk tahap awal, PT Garam akan bertindak sebagai Pengelola Gudang yang sudah memiliki pengalaman mengelola garam rakyat," terang Retno Rukmawati.

Revitalisasi Satgas Waspada Investasi

Institusi anggota Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait kembali memperkokoh komitmen bersama dan menyusun payung hukum dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai Satgas Waspada Investasi. Institusi yang tergabung di Satgas Waspada Investasi itu adalah Otoritas Jasa Keuangan- OJK, Bappebti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman Hadad, dalam penjelasannya di sela-sela penandatanganan nota kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, di Jakarta, 21 Juni 2016, lalu, mengatakan, revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi antara lain meliputi tindakan preventif, represif dan kuratif.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, juga membacakan sambutan Menteri Perdagangan, yang mengatakan, Kementerian Perdagangan mendukung penuh adanya Satgas Waspada Investasi sebagai forum koordinasi lembaga atau institusi dalam upaya melakukan pencegahan dan

penanganan kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang berpotensi melawan hukum dan mengakibatkan kerugian masyarakat.

Dari data OJK (per 11 Juni 2016), masyarakat telah menyampaikan adanya permintaan informasi atau pertanyaan terhadap legalitas 430 perusahaan yang menawarkan investasi mencurigakan. Dari jumlah itu terdapat 374 tawaran investasi yang berkaitan dengan keuangan (emas, forex, e-money, e-commerce, investasi haji dan umroh), sementara sisanya sebanyak 56 tawaran berupa investasi di bidang properti, tanaman komoditas dan perkebunan. Dan dari penelitian lebih lanjut, seluruh perusahaan yang menawarkan investasi dan diragukan aspek legalitasnya, ternyata tidak satupun yang terdaftar di OJK.

Dari jumlah tersebut, terdapat 388 tawaran dari perusahaan yang belum diketahui kejelasan izin beroperasi, 13 tawaran dari perusahaan yang memiliki SIUP/TDP tetapi tidak memiliki izin yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Sedangkan 23 laporan diketahui melakukan penawaran yang menjadi lingkup pengawasan Bappebti, dan 6 tawaran dari perusahaan yang berbentuk koperasi.

Kemendag Gagas Gerakan 'Bangga Menyeduh Kopi Papua'



Kementerian Perdagangan setelah sukses melakukan promosi kopi Indonesia di tingkat global melalui ajang *Specialty Coffee Association of America- SCAA Expo 2016*, kembali meluncurkan program 'Bangga Menyeduh Kopi Papua.'

Menurut Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, disaat meluncurkan gerakan 'Bangga Menyeduh Kopi Papua,' di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 11 Juni 2016, mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian penting dari "Gerakan Papua Bekerja dan Unggul" yang merupakan program milik Kelompok Kerja Papua yang mendapat dukungan sepenuhnya oleh Kementerian Perdagangan.

"Provinsi Papua menyimpan potensi kopi kelas dunia. Papua menjadi salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia yang sangat diminati, selain kopi Gayo, Mandailing, Jawa, Toraja, Sumatera, dan Sulawesi," kata Thomas Lembong.

Data Dinas Perkebunan Provinsi Papua mencatat terdapat 16 kelompok petani kopi di Papua yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Dogiyai.

Sebagai gambaran, perkebunan kopi di Kabupaten Dogiyai merupakan perkebunan peninggalan misionaris Belanda di tahun 1890-an. Pada era tersebut, sebagian besar masyarakat Dogiyai adalah petani kopi. Dan seiring perubahan zaman, masyarakat mulai jarang menanam kopi dan beralih ke berbagai profesi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis, Kemendag, Ni Made Ayu Marthini, mengatakan, edukasi dan dukungan sarana dan prasarana bagi petani kopi di Kab. Gogiyai sangat penting untuk mengangkat masa kejayaan kopi Papua.

"Karena itu, para petani kopi di Papua dan umumnya di Indonesia, harus mendapatkan informasi harga kopi di pasaran. Agar harga kopi di tingkat petani tidak dipermainkan para pedagang, sehingga petani pun dapat lebih sejahtera," tutur Ni Made Ayu Marthini.

Tren Harga Kakao Diprediksi Naik Hingga Akhir 2016

Pasokan kakao dunia bakal tersendat lantaran produksi di wilayah Afrika Barat sedikit terhambat. Karena itu, harga kakao pun diprediksi akan mengalami tren kenaikan hingga akhir 2016.

Menurut prediksi Damien Thouvenel, dari Trader Sucden et Denrees SA, mengatakan, kondisi angin gurun terburuk dalam tiga dekade terakhir. Sehingga diperkirakan mengurangi kualitas kakao di Afrika Barat. Hal itu akan berdampak pada defisitnya pasokan biji coklat global yang diprediksi mencapai 280.000 ton di pasar fisik.

Biji coklat dari panen di tengah musim di Pantai Gading dan Ghana sebagai produsen terbesar di dunia, juga mengalami penurunan ke level terendah dalam dua tahun terakhir. Kualitasnya pun terlalu rendah untuk ekspor, bahkan bila digunakan dalam penggilingan lokal.

Sementara itu, sejumlah analis dan pengusaha pun memperkirakan jumlah permintaan kakao di sisa tahun 2016 akan melebihi pasokan dunia. Olam International Ltd., misalnya, memprediksi defisit kakao mencapai 308.000 ton,



sedangkan Cargill Inc., produsen kakao kedua terbesar di dunia berpendapat, terdapat selisih suplai dan penyerapan sekitar 160.000 ton.

Sedangkan Hightower Report dalam publikasi risetnya menuliskan, pada musim 2015-2016 akan terjadi defisit pasokan kakao global sebanyak 180.000 ton, sesuai dengan estimasi International Cocoa Organization- ICCO. Akibatnya, sentimen itu membuat harga kakao akan menembus zona US\$ 3.051 - US\$ 3.090 per ton dalam waktu dekat.

Coftra set target to reduce the number of complaints by 50%

In addition to restricting trading rules for Commodity Futures Trading (CFT) stakeholders, Coftra is also implementing a certification for CFT marketing employees as a strategy to decrease the number of public complaints by 50%, stated the Chairman of Coftra, Bachrul Chairi to the journalists on a recent media briefing event in Jakarta.

"Legal protection on commodity futures trading doesn't acknowledge the role of marketing resource, however the role is instrumental in this industry. Therefore we will do a certification on marketing resources by conducting a test which will be preceded by an aptitude test on commodity futures trading," Bachrul Chairi explained.

"Even though the marketing resources eventually has a certification, handling the customers is still the responsibilities of the futures brokers representatives," Bachrul added.

"After we conducted a certification on futures broker marketing resources, we expect that the number of public complaints can be reduced up to 50%. Referring to the data,



many public complaints came from illegal practice of marketing resources," He said.

The other strategy that will be implemented by Coftra to reduce the number of public complaint is by enhancing various transaction rules and by giving protection to public from being trapped by careless transaction.

JFX optimistically reaches target of 1.5 million lots of multilateral contract



"safe heaven" investment products, such as gold futures contract," Paulus explained. Meanwhile for agriculture commodity futures contract in JFX, such as Cocoa, Coffee and Olein contract, the price fluctuation are much affected by the factor of supply and demand, foreign currency exchange rate, and climate or season changes.

"We are still optimistic that JFX's multilateral transaction growth will reach 1.5 million lot in 2016, through various flagship programs that we have established and the additional of multilateral futures contract at the end of the year, we will be expected to reach target of 1.5 million lots," Paulus said.

As an illustration, the industry performance in the first quarter of 2016 was showing a significant improvement on multilateral transaction volume of 24.22% or 475.646 lot. While on the same period in January – April 2015, the multilateral transaction volume only reached 382.920 lots.

For more details, the total of multilateral contract transaction volume in JFX on the first quarter was 272.597 lots, while the data in ICDX (Indonesian Commodity and Derivatives Exchange) only totaled 203.049 lots.

Seeing the market growth in 2016, JFX President Director Stephanus Paulus Lumintang, said to Buletin Bappebti that global economic condition is very weak even though there's improvement. "Therefore, there's a potential increase in the transfer of risk from the public, especially on the investor's side," he explained.

"Responding to that situation, investor will find protection on



0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

Saidi Hartono, Jember, Jatim (46)

0852210xxxxxx

Tanya;

Kepada Yth Bappebti

Beberapa waktu belakangan ini cukup banyak pemberitaan yang mengulas tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang dilakukan oleh Jamkrindo. Pertanyaan kami, bagaimana teknis penjaminan Jamkrindo terhadap SRG.

Jawaban:

Yth. Pak Saidi Hartono, penunjukan Perum Jamkrindo sebagai pelaksana penjaminan SRG berdasarkan PP No. 1 Tahun 2016, tentang lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang. Dan dalam pelaksanaannya, Jamkrindo menjamin hak-hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan terhadap kelalaian, kegagalan, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya.

Adapun komoditi yang bisa disimpan oleh Pengelola Gudang dalam pelaksanaan SRG, yaitu komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, timah, kopra, gambir dan teh. Total gudang yang telah mendapat persetujuan sebagai gudang SRG yakni sebanyak 120 di 19 provinsi. Dengan penjaminan Jamkrindo itu, diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan pelaku usaha baik pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang, perbankan maupun kalangan dunia usaha.

Lebih sederhananya lagi, Jamkrindo bertindak layaknya Lembaga Penjaminan Simpanan- LPS pada industri perbankan.

Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Convergence

The tendency for prices of physicals and futures to approach one another, usually during the delivery month. Also called a "narrowing of the basis".

2. Conversion

When trading options on futures contracts, a position created by selling a call option, buying a put option, and buying the underlying futures contract, where the options have the same strike price and the same expiration.

3. Corn-Hog Ratio

See Feed Ratio.

4. Corner

(1) To corner is to secure such relative control of a commodity or security that its price can be manipulated; (2) In the extreme situation, obtaining contracts requiring delivery of more commodities or securities than are available for delivery.

5. Cornering

Buying so much of a commodity or security that a degree of control over its price is achieved. This practice is illegal in The Malaysian futures and options market.

6. Cost of Tender

Total of various charges incurred when a commodity is certified and delivered on a futures contract.

7. Cost-of-Carry

The cost built-in to the price of a forward item it includes the interest rate and any other receipts built-in to a forward price. Also known as the 'carrying charge'.

8. Counter-Trend Trading

In technical analysis, the method by which a trader takes a position contrary to the current market direction in anticipation of a change in that direction.

9. Counterparty

The agent on the other side of a contract.

10. Coupon (Coupon Rate)

A fixed dollar amount of interest payable per annum, stated as a percentage of principal value, usually payable in semiannual installments.

Penerbitan Resi Gudang Bulan April 2016

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	PENERBITAN				
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Volume Komoditi (ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1	PT. BGR (PERSERO)					
	- Gudang Wonogiri	Gabah	1	30,00	5.000	150.000.000
	- Gudang Bireuen	Gabah	2	99,92	5.300	529.576.000
	- Gudang Kuningan	Gabah	2	40,00	5.000	200.000.000
	- Gudang Tapin	Gabah	1	10,07	4.500	45.297.000
	- Gudang Probolinggo	Gabah	1	18,32	4.150	76.019.700
	- Gudang Banyuasin	Gabah	2	35,70	3.500	124.950.000
	2	PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA				
	- Gudang Daya Tani Ngawi	Beras	3	250,00	7.500	1.875.000.000
	- Gudang Bogor	Gabah	4	33,78	4.521	152.700.200
3	PT. POS INDONESIA (PERSERO)					
	- Gudang Tasikmalaya	Gabah	4	50,00	5.360	268.000.000
		Jagung	10	270,00	4.000	1.080.000.000
4	KOPERASI NIAGA MUKTI					
	- Gudang Cianjur	Gabah	10	170,53	6.174	1.052.834.000
5	PT. PERTANI (PERSERO)					
	- Gudang Grobogan	Gabah	2	31,50	5.200	163.800.000
JUMLAH		Gabah	29	519,81		2.763.176.900
		Beras	3	250,00		1.875.000.000
		Jagung	10	270,00		1.080.000.000
TOTAL			42	1.039,81		5.718.176.900

Pembiayaan Resi Gudang Bulan April 2016

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	PENERBITAN			PEMBIAYAAN			
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Volume (ton)	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1	PT. BGR (PERSERO)							
	- Gudang Wonogiri	Gabah	1	30,00	150.000.000	-	-	-
	- Gudang Bireuen	Gabah	2	99,92	529.576.000	-	-	-
	- Gudang Kuningan	Gabah	2	40,00	200.000.000	1	63.000.000	BJB
	- Gudang Tapin	Gabah	1	10,07	45.297.000	1	31.000.000	Bank Kalsel
	- Gudang Probolinggo	Gabah	1	18,32	76.019.700	-	-	-
	- Gudang Banyuasin	Gabah	2	35,70	124.950.000	-	-	-
	2	PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA						
	- Gudang Daya Tani Ngawi	Beras	3	250,00	1.875.000.000	-	-	-
	- Gudang Bogor	Gabah	4	33,78	152.700.200	-	-	-
3	PT. POS INDONESIA (PERSERO)							
	- Gudang Tasikmalaya	Gabah	4	50,00	268.000.000	2	113.000.000	BJB
		Jagung	10	270,00	1.080.000.000	7	525.000.000	BJB
4	KOPERASI NIAGA MUKTI							
	- Gudang Cianjur	Gabah	10	170,53	1.052.834.000	10	729.825.000	BJB
5	PT. PERTANI (PERSERO)							
	- Gudang Grobogan	Gabah	2	31,50	163.800.000	-	-	-
JUMLAH		Gabah	29	519,81	2.763.176.900	14	936.825.000	
		Beras	3	250,00	1.875.000.000	-	-	
		Jagung	10	270,00	1.080.000.000	7	525.000.000	
TOTAL			42	1.039,81	5.718.176.900	21	1.461.825.000	

Sumber : BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SRG DAN PLK, BAPPEBTI

Catatan : Gudang yang dibangun menggunakan APBN

SRG dan Pasar Lelang Komoditi Part I



Hai Bee,,!!!
Apa kabar???
Baru sampai ya,,??

Ia 'nih Peb, aku cuti beberapa hari untuk
beri laporan ke kampus dari hasil KKN ku di desa.

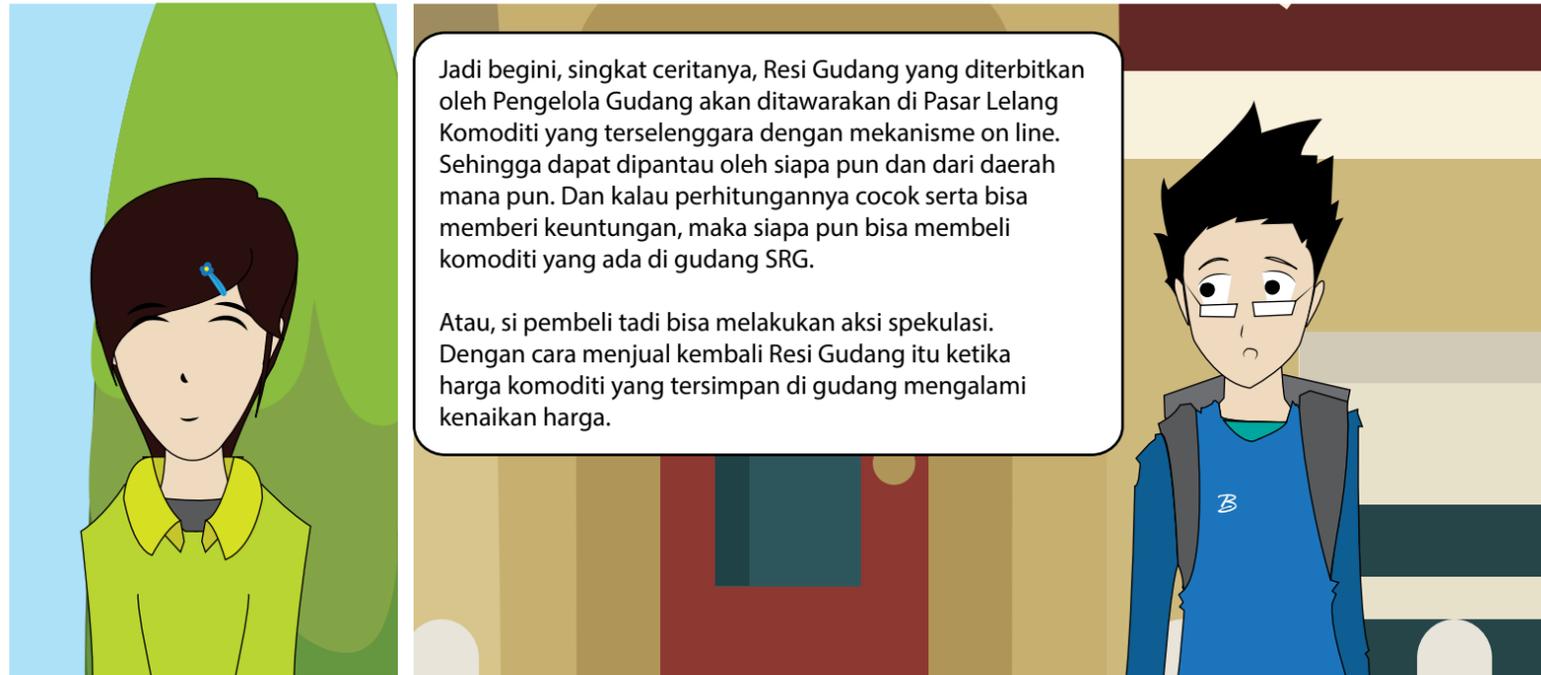


Wah,, pasti seru dong laporan mu ke kampus???

Ya, begitu deh,, ternyata masih banyak petani
yang belum tahu tentang SRG.

Oh ya Bee,, beberapa hari lalu aku baca berita koran 'loh,
katanya SRG akan dipadukan dengan Pasa Lelang Komoditi on line.
Maksudnya bagaimana ya Bee,,???

Hmmm,, ternyata kamu cukup
mengikuti juga ya perkembangan SRG.



Jadi begini, singkat ceritanya, Resi Gudang yang diterbitkan
oleh Pengelola Gudang akan ditawarkan di Pasar Lelang
Komoditi yang terselenggara dengan mekanisme on line.
Sehingga dapat dipantau oleh siapa pun dan dari daerah
mana pun. Dan kalau perhitungannya cocok serta bisa
memberi keuntungan, maka siapa pun bisa membeli
komoditi yang ada di gudang SRG.

Atau, si pembeli tadi bisa melakukan aksi spekulasi.
Dengan cara menjual kembali Resi Gudang itu ketika
harga komoditi yang tersimpan di gudang mengalami
kenaikan harga.

Dengan pengertian seperti itu Bee,
Resi Gudang bisa berpindah tangan berkali-kali dong???

Benar. Tetapi, tentunya sebelum Resi Gudang itu
jatuh tempo yang rata-rata lamanya sekitar enam bulan.



Wow,,!!! Kalau sudah begitu,
SRG makin seru dong Bee,,???

Benar Peb,,!!!
Dengan kondisi yang seperti itu, maka petani nantinya akan memiliki
posisi tawar yang tinggi di saat musim panen. Di samping itu,
tak akan menjual komoditinya di saat harga sedang anjlok.
Dengan kata lain, petani pun nantinya tak lagi tergantung dengan
sistem ijon atau cengkraman tengkulak. Sebab, dengan memiliki Resi Gudang
petani bisa memperoleh pembiayaan dari bank untuk berbagai keperluannya.

Oh ya Bee,, kamu masih kelihatan capek 'tuh. Masuk dulu 'gih,,
mandi dan istirahat ya. Nanti kita lanjutkan lagi cerita mu.

Hmmm,, ia deh!!! Daaa,, Peb,,!!!



Lie Ricky Ferlianto *)

Perbandingan KBE vs Produk Lainnya

Part II

Kontrak Berkala Emas- merupakan jenis *hybrid* dari kontrak berjangka, kontrak gulir harian, pasar fisik, cicil emas, dan gadai emas. KBE adalah salah satu produk inovasi *Jakarta Futures Exchange- JFX* yang berupaya memberikan solusi terbaik kepada investor emas dengan menggabungkan kebaikan-kebaikan dari model-model investasi emas yang telah ada sebelumnya.

Keunggulan utama KBE dibandingkan dengan jenis investasi berbasis emas lainnya adalah fleksibilitas yang ditawarkan oleh KBE. Fleksibilitas cicilan, fleksibilitas menentukan lokasi penyerahan, fleksibilitas penyimpanan,

dan kemudahan penjualan kembali sebelum serah fisik.

Namun demikian, ketika kebaikannya digabung, tentu ada sifat-sifat yang merupakan kelemahan masing-masing investasi yang bisa terserap ke dalam produk Kontrak Berkala Emas. Pertama, dari sisi pembeli, investor selalu akan mengharapkan harga emas naik. Hal ini tentu sama dengan jenis investasi apapun di mana investor "memiliki aset". Mereka selalu berharap nilai assetnya akan bergerak naik. Namun demikian, karena adanya fleksibilitas pelunasan dan fleksibilitas serah fisik, maka walaupun harga emas turun, maka pembeli bisa dengan mudah dan

relatif cepat (paling lama satu bulan), memiliki fisik emas yang dibelinya. Bahkan bila memutuskan untuk menerima emas fisik, seorang pembeli tidak dikatakan rugi sama sekali. Karena harga emasnya akan terikat pada harga saat pembeli melakukan transaksi beli melalui sistem aplikasi kontrak berkala emas. Meskipun harga emas saat serah terima mungkin lebih rendah, faktanya pada saat seorang investor memutuskan untuk membeli emas, ia melihat harga emas yang ada saat pembelian terjadi. Pembeli saat itu hanya membeli emas pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga saat ini. Yang pasti, untuk meraih keuntungan dalam perdagangan Kontrak Berkala

Emas, investor tidak perlu menunggu kenaikan harga hingga 30 %. Dengan kenaikan harga sekitar 1,5 % saja, nasabah biasanya sudah cukup untuk mencapai *break even point- BEP*. Ini berarti Kontrak Berkala Emas bisa dipandang sebagai investasi jangka pendek. Lakukan pembelian, begitu harga emas bergerak naik melewati batas BEP, maka investor bisa langsung menjual kembali untuk meraih *capital gain* atau keuntungan dari selisih jual-beli. Bagi investor yang ingin investasi untuk jangka waktu yang lebih lama, KEB memungkinkan investor melakukan pelunasan emas tapi terus menyimpannya di tempat penyimpanan. Umumnya investor melakukan hal ini untuk menghindari kewajiban membayar nilai beda bunga harian yang dihitung dari besarnya pembiayaan. Karena saat emas sudah dilunasi dengan menyeter *full margin*, maka nilai pembiayaan menjadi nol. Dengan strategi ini, investor punya peluang untuk menjual kembali emas melalui sistem tanpa kerugian ongkos cetak. Hanya saja, dengan strategi seperti ini, ada fasilitas penyimpanan emas yang digunakan oleh nasabah. Hal ini tentu melibatkan biaya penyimpanan yang dibayarkan setiap akhir bulan. Namun aktivitas ini bisa dipandang sebagai menyimpan emas di *safe deposit box* suatu bank. Bahkan nilainya lebih kecil dibandingkan sewa *safe deposit box*. Akan tetapi bila dibandingkan dengan menyimpannya di bawah bantal, tentu akan lebih mahal. Seorang investor bisa menghindari kewajiban biaya ini dengan mudah. Caranya adalah melakukan serah terima fisik secepatnya setelah emas dilunasi. Pembiayaan bisa dianggap sebagai suatu bentuk kemudahan. Namun konsekuensi bunga dari pembiayaan bisa dianggap sebagai kelemahan. Sekali lagi, keunggulan utama KEB adalah fleksibilitas. Kalau belum mampu melunasi, silahkan gunakan pembiayaan. Namun bila ingin menghindari adanya beda bunga

pembiayaan, silakan langsung lunasi dengan penyetoran margin 100 %. Kombinasi pembiayaan dan BEP yang rendah bisa digunakan untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki investor. Namun hal ini memerlukan sedikit analisa tambahan, karena investor harus meyakini bahwa peluang kenaikan harga emas sangat besar. Namun upaya ini bisa memberikan hasil yang memuaskan. Strateginya dijelaskan dalam ilustrasi sebagai berikut ; Misalkan investor memiliki cukup dana untuk membeli tunai kepingan emas 100 gram. Maka dengan margin *requirement* 10 %, investor tersebut bisa membeli 10 keping emas 100 gram pada sistem Kontrak Berkala Emas. Setelah harga emas bergerak naik melewati batas BEP, maka investor dapat menjual keseluruhan kontrak beli yang dimilikinya. Misalnya harga emas bergerak naik 3 %, maka dikurangi tingkat BEP sekitar 1,5 % (mencakup nilai komisi dan selisih harga *buy back*), investor mendapatkan keuntungan sebesar 1,5 % dari setiap keping emas 100 gram yang dibelinya. Hal ini berarti investor mendapatkan keuntungan sebesar 10 keping dikalikan 1,5 %. Totalnya mencapai 15 %!!!

Sebagai catatan, saat harga emas bergerak naik, maka kenaikan 3 % bisa tercapai dalam waktu yang relatif singkat (bisa kurang dari satu minggu). Jadi untuk mengoptimalkan dana yang dimiliki, investor tidak perlu menunggu 2-3 tahun. Investor hanya perlu menunggu *moment* yang tepat saat harga memiliki peluang kenaikan 3 %. Terakhir, sebagai produk jasa perdagangan, Kontrak Berkala Emas tidak bisa terhindar dari biaya komisi transaksi atau biaya administrasi. Hal ini akan ada dalam setiap produk investasi terkait emas kecuali membeli emas dan menyimpannya di rumah. Mulai dari perdagangan kontrak berjangka, kontrak gulir berkala, gadai emas, cicil emas, dan tabungan emas, pasti akan melibatkan suatu biaya komisi transaksi.

Keunggulan KBE

1. Harga tersentralisir. Karena ditransaksikan dalam satu bursa, maka seluruh pelaku pasar dari seluruh wilayah Indonesia akan melihat dan bisa bertransaksi pada harga yang sama.
2. *Capital Gain*. Bagi pembeli yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga naik, ia bisa melakukan *re-sell* dengan mudah tanpa dipotong ongkos cetak.
3. Bisa serah terima fisik di cabang-cabang PT Pegadaian
4. Bisa digulirkan. Bilamana pembeli ingin emasnya tetap dalam penguasaan lembaga kliring berjangka, maka ia bebas memilih untuk mempertahankan posisi terbukanya dan menggulirkan ke bulan kontrak baru saat bulan kontrak yang sekarang telah jatuh tempo.
5. Tanpa biaya cetak selama belum memilih untuk melakukan serah terima fisik
6. *Retail* dengan pilihan produk beragam
7. Harga *spot*. Karena hanya satu bulan kontrak, emas ditransaksikan dengan harga yang berlaku saat ini sehingga lebih memudahkan bagi investor.
8. Jatuh tempo setiap bulan. Hal ini memudahkan pembeli dalam memilih waktu serah terima.
9. Mekanisme gulir yang memungkinkan posisi transaksi dapat dipertahankan dengan periode waktu yang tidak terbatas.
10. Cicilan suka-suka, tanpa batas waktu melalui penambahan margin.
11. Transaksi menggunakan sistem transaksi elektronik *online*.
12. Kebutuhan dana yang tidak besar.
13. Adanya kepastian ketersediaan emas fisik.
14. Dijamin lembaga kliring berjangka

*) Kepala Divisi Research & Business Development Jakarta Futures Exchange



Hepi Priyanto

SRG Pemalang Siap Melenggang

Kab. Pemalang sebagai sentra dan salah satu penyangga komoditi pangan di Provinsi Jawa Tengah, telah ancap-ancang implementasikan Sistem Resi Gudang- SRG. Sebab itu, gudang SRG Pemalang ditempatkan di lokasi strategis dekat dengan pusat perdagangan dan pasar beras dan gabah.

"Sistem Resi Gudang sangat prospektif untuk berkembang di Pemalang," kata Hepi Priyanto, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kab. Pemalang.

Sepenggal kalimat Hepi itu cukup beralasan. Sebab, data terakhir menunjukkan produksi beras Kab. Pemalang di tahun 2015 mencapai 491 ribu ton. Sedangkan untuk konsumsi masyarakat lokal hanya sekitar 170.580 ton beras. Alhasil, Kab. Pemalang surplus sekitar 203.142 ton beras.

"Karena itu, jika masuk masa panen, para pedagang sudah hiruk pikuk di sini mencari gabah petani. Dan membawanya ke berbagai daerah, ada yang ke sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat bahkan ke DKI Jakarta. Di sana para pedagang itu mengolahnya dan memberi merek tertentu, dan kemudian mereka menjualnya dengan harga yang cukup tinggi," terang Hepi kepada **Buletin Bappebti** di ruang kerjanya, belum lama ini.

Makanya, kata Hepi, untuk mendapatkan nilai tambah dari perdagangan gabah dan beras, Pemda Pemalang telah membangun pusat perdagangan beras dan gabah yang bersebelahan langsung dengan gudang SRG, yang terletak di Jln. Slamet Riyadi, Desa Pelutan, Kec. Pemalang. "Harapan kami, nantinya di situ akan terjadi interaksi perdagangan antara petani dan pedagang beras. Misalnya, kalau petani tak mendapatkan harga gabah yang wajar, maka petani bisa menyimpan komoditinya ke gudang SRG," katanya.

"Lokasi ini memang cukup strategi sebagai pusat perdagangan. Sebab, di sekitar itu terdapat pasar tradisional, gudang SRG, pusat perdagangan beras dan gabah serta terminal bus. Selain itu juga, dekat dengan jalur Pantura. Karenanya, pasar gabah dan beras Pemalang itu sudah kami proyeksikan sebagai pasar gabah dan beras yang terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan juga, akan menjadi barometer

perdagangan beras," jelas Hepi.

Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, ujar pria kelahiran Pemalang, 11 Desember 1963, ini, juga akan dibangun pusat perdagangan ternak.

"Jadi, sangat tepat jika di Pemalang terdapat gudang SRG. Karena instrumen ini akan melindungi petani manakala harga gabah turun di saat panen raya. Petani pun bisa menunda penjualannya dengan menyimpan komoditinya di gudang SRG. Dan, ketika harga gabah sudah stabil, petani bisa melakukan penjualan sehingga tidak mengalami kerugian," ujar Hepi.

Menurut alumnus Fak. Sospol, UNS Solo, 1990, ini, untuk mewujudkan instrument SRG di Kab. Pemalang, masih terdapat sejumlah PR- pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sebab itu, instansi yang dipimpin Hepi Priyanto, ini, cukup proaktif berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait. "Sinergitas dengan berbagai stakeholder SRG terus kami lakukan, dan secara simultan kami pun melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau pun petani," katanya.

"Sejak adanya rencana pembangunan gudang SRG itu, kami sudah menjalin koordinasi dengan dinas pertanian. Karena secara teknis mereka 'lah yang banyak berhubungan dengan para petani dan mereka memiliki tenaga penyuluh pertanian yang dapat menjembatani pentingnya SRG ini," ucap suami dari Sri Wahyuningsih Kartika Johar, ini.

Lebih jauh dijelaskan, dari hasil koordinasi dengan dinas pertanian itu, maka terpilih 'lah Koperasi Tani Makmur Sejahtera- KTMS yang dipersiapkan sebagai calon Pengelola Gudang SRG. Sejak Oktober 2015 lalu, KTMS sudah mengikat kerjasama dengan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) dalam pendampingan pengelolaan gudang SRG.

"Sebagai gambaran, KTMS ini merupakan gabungan kelompok tani. Makanya Gapoktan inilah yang dipercayakan nanti sebagai Pengelola Gudang SRG, karena mereka bisa

berhubungan langsung dengan para petani," kata Hepi.

Selain itu, Hepi juga melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pemalang, yang juga memiliki program nyaris sama dengan SRG. Dikatakan, di instansi itu terdapat program bantuan talangan dana untuk pembelian gabah saat panen raya, atau dikenal dengan dana Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan- LUEP. "Program ini bersifat sosial, tidak ada sisi bisnisnya. Jadi, tidak seperti SRG," ucapnya.

Awalnya, program LUEP itu berasal dari pemerintah provinsi, tapi karena sudah dilepas, jadi Pemkab Pemalang yang melanjutkannya. "Karena itu kami coba menggandengnya, untuk *sharing* anggaran yang dapat membantu dalam pengelolaan gudang SRG serta meningkatkan kesejahteraan petani."

Dukungan Legislatif

Persiapan Pemda Pemalang mengimplementasi SRG tak luput mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Sejak rencana pembangunan gudang SRG diwacanakan tahun 2013 lalu, DPRD Kab. Pemalang telah menganggarkan sejumlah dana untuk mendukung Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dalam implementasi SRG.

"Dukungan DPRD cukup besar kepada kami, karena itu juga kami bersemangat dalam implementasi SRG ini. Dengan adanya dukungan DPRD itu menunjukkan bahwa kami tak berjalan sendirian, itu artinya kami diawasi dan diberi target. Di samping itu, kami juga bisa 'meminjam tangan' DPRD untuk mendapat dukungan instansi terkait lainnya," ujar ayah satu anak ini.



"Kami baru saja merealisasikan pembuatan lantai jemur di gudang SRG yang dianggarkan tahun 2015 lalu. Dan di tahun 2016, ini, kami pun mendapat Anggaran Belanja Tambahan- ABT yang jumlahnya mencapai Rp 200 juta," jelas Hepi.

Menurut pengemar H. Rhoma Irama, ini, sejatinya Kab. Pemalang bisa memiliki lebih dari dua unit gudang SRG. Hal itu dikarenakan surplus beras yang cukup besar setiap tahunnya. Namun demikian, dia cukup yakin jika SRG sudah memasyarakat akan mendapat dukungan dari kalangan pengusaha yang memiliki fasilitas gudang.

"Kalau SRG ini sudah berjalan efektif di Pemalang, saya cukup yakin akan ada pengusaha yang menawarkan gudangnya untuk dijadikan gudang SRG. Sebab itu, sosialisasi dan edukasi SRG sangat penting untuk membuka cakrawala petani," pungkas Hepi Priyanto.



***Marhaban Ya
Ramadhan
1437 H***